

DINAMIKA POLITIK ELITE NU
(Studi tentang Perbedaan Preferensi Politik Kiai Jawa Timur Pada
Pemilihan Presiden 2014)



Oleh:

M i s k i, S.H.I.

NIM: 1520310038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misk i, S.H.I.

NIM : 1520310038

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Misk i, S.H.I

NIM: 1520310038

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M i s k i, S.H.I.

NIM : 1520310038

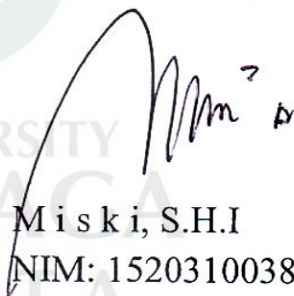
Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



M i s k i, S.H.I

NIM: 1520310038



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-229/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "DINAMIKA POLITIK ELITE NU (STUDI TENTANG PERBEDAAN PREFERENSI POLITIK KIAI JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISKI, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310038
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 26 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19610430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul

DINAMIKA POLITIK ELITE NU
(Studi tentang Perbedaan Preferensi Politik Kiai Jawa Timur pada
Pemilihan Presiden 2014)

Yang ditulis oleh:

Nama : Miski, S.H.I.
NIM : 1520310038
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam.

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Pembimbing



Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP. 196810201998031002

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada dinamika politik elite NU dengan studi kasus perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pilpres 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana bentuk perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pemilihan presiden 2014. *Kedua*, mengapa terjadi perbedaan preferensi politik antar kiai Jawa Timur. *Ketiga*, bagaimana mereka memaknai dan merekonsiliasi konflik akibat dari perbedaan preferensi politik tersebut?.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan empat teori yaitu: teori elite, teori fragmentasi elite, teori *al-fiqh al-Ikhtilaf*, dan teori resolusi konflik. Teori elite untuk menganalisis peran politik kiai dipangggung pemilu Indonesia. Teori fragmentasi elite digunakan untuk menganalisis spektrum perbedaan politik dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Teori *al-fiqh al-ikhtilaf* untuk menganalisis pendapat kiai tentang makna fragmentasi politik. Sedangkan teori resolusi konflik adalah untuk menganalisis penyelesaian konflik akibat dari perbedaan politik tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan skunder yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian ini sebagai berikut: bentuk perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pilpres 2014 terdapat tiga kubu kiai: *pertama*, kubu Prabowo-Hatta. *Kedua*, kubu Jokowi-JK. *Ketiga*, independen/netral. Dalam konteks pilpres 2014 kiai berperan sebagai: *pertama*, sebagai aktor yaitu kiai berperan sebagai tim sukses atau juru kampanye. *Kedua*, hanya sebagai pendukung. *Ketiga*, sebagai partisipan yaitu kiai yang hanya memberikan restu pada semua capres tapi tidak terlibat dalam saling dukung-mendukung.

Perbedaan preferensi politik kiai tersebut dipengaruhi oleh adanya spektrum mainstream kiai, utamanya dalam aras politik ke-NU-an, sehingga menimbulkan beberapa kelompok kiai antara lain: kelompok fundamentalis politik, moderat politik, dan kelompok khittois produktif. Perbedaan preferensi politik kiai dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1). Faktor internal yaitu: a) kontinuitas konflik politik di internal NU. b) Organisasi NU yang inklusif. (2). Faktor eksternal yaitu: a) terjadinya transisi dan liberalisasi politik di Indonesia. b) pragmatisme politik kiai.

Perbedaan preferensi politik antar kiai adalah rohmat dan dihalalkan oleh Islam. Perbedaan politik dikalangan para kiai biasanya cuma sesaat dan temporal dan tidak merambah ke bentuk konflik apalagi perpecahan. Sedangkan rekonsiliasi ala kiai itu bersifat kekeluargaan dan sosial.

Keywords: Kiai, Perbedaan Preferensi Politik, Pilpres 2014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى
آله وأصحابه ومن تبعه: أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi agung Muhammad SAW, dan para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusunan Tesis dengan judul: “Dinamika Politik Elite NU (Studi tentang Perbedaan Preferensi Politik Kiai Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 2014)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, MA dan bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag. selaku tim penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan untuk perbaikan dalam Tesis ini.
6. Para kiai Jawa Timur khususnya KH Hasan Mutawakkil Alallah yang sudi penulis wawancarai, atas do'a dan bimbingannya penulis ucapkan terimakasih.
7. Seluruh staf pengajar di Prodi Magister Hukum Islam, konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, penulis ucapkan terima kasih atas pelajaran dan kasih sayang yang sudah diberikan selama ini.
8. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan istri saya, Hairiyah, S.Pd.I., M.S.I. dan anak-anak saya: kak Dava dan adik Jihan.
9. Kepada ayahanda Muhammad Anwar, ibunda Siti Barokah, dan adinda Siti Rofiqoh, S.Pd.I., M.Pd.I. yang selalu berusaha memotivasi penulis dengan usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan arti hidup tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Walaupun belum

bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah saya sia-siakan.

10. Teman-teman di Lembaga Survei Indonesia (LSI), terimakasih atas semuanya, baik dukungan moril maupun materil, kalian semua adalah pejuang data demi perkembangan kualitas demokrasi Indonesia.

11. Teman-teman SPPI 2015. saya ucapkan terimakasih atas dukungan, motivasi sehingga Tesis ini bisa terselesaikan. Semoga kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya.

Diharapkan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang sakral saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1438 H

14 Mei 2017 M.

Penyusun,


Miski, S.H.I

Nim: 1520310038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II : KIAI DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA

A. Wacana Kiai dan Politik	30
1. Kiai dan Politik: Kiai sebagai Elite	30
2. Peran Kiai dalam Dinamika Politik Indonesia	37
B. Khittah NU 1926 dan Politik Kiai di Panggung Pemilu	46
1. Khittah NU 1926 dan Partisipasi Kiai dalam Politik Praktis .	46
2. Dinamika Politik Kiai dalam Pilpres Secara Langsung	53

BAB III : DINAMIKA PREFERENSI POLITIK KIAI JAWA TIMUR

PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

A. Konfigurasi Politik Kiai di Jawa Timur	64
1. Sosial-Politik Jawa Timur dan Dinamika Pilpres 2014	64
2. NU Jawa Timur dan Konfigurasi Politik Kiai	70
B. Dinamika Preferensi Politik Kiai Jawa Timur Pada Pilpres 2014	79
1. Kubu Prabowo-Hatta	81
2. Kubu Jokowi-JK	86
3. Independen/Netral	87
C. Bentuk Preferensi Politik Kiai Jawa Timur pada Pilpres 2014	89

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN PREFERENSI POLITIK

KIAI JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

A. Spektrum Perbedaan Preferensi Politik Kiai Jawa Timur pada Pilpres 2014	94
---	----

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Preferensi Politik Kiai ...	97
1. Faktor Internal	
a. Kontinuitas Konflik Politik di Internal NU	98
b. Organisasi NU yang Inklusif	100
2. Faktor Eksternal	
a. Transisi dan Liberalisasi Politik di Indonesia	101
b. Pragmatisme Politik Kiai	102
C. Makna Perbedaan Preferensi Politik Kiai	103
D. Rekonsiliasi antar Kiai Pasca Pilpres 2014	105

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. Daftar Tabel

Tabel 1: Hasil Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2: Perolehan Suara Pemilu 1955	41
Tabel 3: Perolehan Suara Pemilu 1971	41
Tabel 4: Perolehan Suara Pemilu 1999	51
Tabel 5: Perolehan Suara Pemilu 2004	51
Tabel 6: Perolehan Suara Pemilu 2009	51
Tabel 7: Perolehan Suara Pemilu 2014	51
Tabel 8: Pasangan Capres-Cawapres 2004	54
Tabel 9: Perolehan Suara Pilpres Putaran Pertama 2004	58
Tabel 10: Perolehan Suara Pilpres 2009	61
Tabel 11. Perolehan Suara Pilpres 2014	63
Tabel 12. Perolehan Suara Pemilu 1999 di Jawa Timur	68
Tabel 13. Perolehan Suara Pemilu 2004 di Jawa Timur	68
Tabel 14. Perolehan Suara Pemilu 2009 di Jawa Timur	68
Tabel 15. Perolehan Suara Pemilu 2014 di Jawa Timur	68
Tabel 16. Perolehan Suara Pilpres 2004 di Jawa Timur	69

B. Daftar Gambar

Gambar 1: Peta Provinsi Jawa Timur	65
Gambar 2. Tausiyah Masyayikh Lirboyo	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang kiai¹ senantiasa berhubungan erat dengan *power* dan faktor penentu dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Diskursus tentang kiai ada dua pendapat yang berkembang saat ini; *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa kiai adalah tokoh agama yang konservatif dan sulit menerima pembaharuan, sebagaimana hasil penelitian Geertz, peran kiai hanya sekedar *cultural broker*. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa kiai adalah elite yang dinamis, rasional dan mau menerima pembaharuan sebagaimana hasil penelitian Dhofier dan Horikhosi. Bahkan hasil penelitian Dirjosanyoto dan Endang Turmudi menyatakan bahwa kiai adalah tokoh agama sekaligus tokoh politik.²

Dinamika politik Indonesia yang terjadi saat ini, telah berdampak pada perubahan sistem politik dan keragaman politik dikalangan masyarakat, tak terkecuali di kalangan elite NU. Fenomena tersebut telah melahirkan keragaman politik bahkan dinamika politik yang diperankan oleh para kiai. Politik kiai mengalami pasang surut seiring dengan pasang surutnya

¹ Penulisan kata “Kiai” disesuaikan dengan penulisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kecuali dalam hal pengutipan berupa judul buku, makalah dan judul opini di media massa, maka tetap ditulis sesuai dengan aslinya.

² Lihat selengkapnya hasil penelitian yang dilakukan oleh: Clifford Geertz, *The Javanese Kiyai: The Changing Role of Cultural-Broker*, dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol 2. (tt. tp. 1960); Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982); Hiroko Horikhosi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987); Pradjarta Dirjosanyoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren: Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999); Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

keterlibatan NU dalam politik. Dinamika politik kiai saat ini merupakan keniscayaan karena perbedaan cara pandang terhadap diktum NU kembali ke Khittah 1926.³ Dalam beberapa kasus fenomena ini telah memicu ketegangan bahkan konflik politik antar kiai sebagai elite NU. Ada beberapa faktor yang dijadikan alasan ketertarikan elite NU atau seorang kiai terlibat dalam politik praktis; *Pertama*, para kiai masih beranggapan bahwa partai politik masih relevan sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi umat. *Kedua*, para politisi lebih punya pengaruh di lingkungan NU ketimbang yang bukan politisi. *Ketiga*, sistem politik saat ini masih memungkinkan kiai memperjuangkan kepentingannya lewat jalur politik.⁴

Studi ini akan memfokuskan pada keterlibatan kiai dalam politik praktis (*real politics*) yaitu keterlibatan kiai di panggung pemilu khususnya pilpres 2014. Fenomena pilpres 2014 begitu menarik karena perhelatan pesta demokrasi ini penuh dengan dinamika dan persaingan, tidak terkecuali dikalangan para elite kiai NU terjadi fragmentasi politik. Fragmentasi dikalangan para elit NU tersebut sebagai akibat dari perbedaan dukungan

³ Diktum kembali ke Khittah, artinya kembali ke garis perjuangan ketika NU didirikan pada 31 Januari 1926. Hasil Muktamar Situbondo menyatakan, hubungan NU dan Politik disebutkan bahwa "Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU. Tetapi NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis". Baca selengkapnya: Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hlm. 89. Sebuah tantangan besar bagi NU ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan beberapa elite Kiai mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998, ada yang mengatakan alasan pendirian PKB adalah jalan tengah (*tawassuth*) yang terbaik bagi NU dan warganya seiring dengan perubahan politik nasional. Lihat: Asmawi, *Jendela Politik Gusdur* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), hlm. 21-27

⁴ Muhibbin, *Politik Kiai vs Politik Rakyat, Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 83.

pada capres-cawapres tertentu yang berdampak pada independensi dan demokratisasi bahkan konflik politik antar warga nahdliyin.⁵

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, sadar atau tidak sadar perhelatan demokrasi ini telah memecah rakyat Indonesia menjadi dua kelompok politik, hal ini juga berimplikasi pada terjadinya fragmentasi politik dikalangan elite kiai NU di Jawa Timur.

Membidik dukungan kiai begitu sangat penting karena seorang kiai selain sebagai penyokong suara, kiai juga mempunyai pengaruh di masyarakat sebagai pengumpul suara (*voot getter*) untuk memperoleh kemenangan. Para capres-cawapres berlomba-lomba untuk mencari dukungan para kiai untuk meraih suara massa. Dalam konteks ini, kiai menjadi primadona bagi capres-cawapres untuk pendulang suara, dengan cara *sowan* (berkunjung) atau bersafari ke kiai-kiai dan pesantren-pesantren yang mempunyai massa santri dan basis nahdliyin.

Fakta ini menarik untuk diteliti bahwa dalam elite NU Jawa Timur terjadi fragmentasi atau faksionalisme⁶ sikap politik khususnya dalam pilpres 2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fragmentasi politik kiai tersebut, dengan sebuah

⁵ Perbedaan afiliasi politik antar kiai tersebut telah menyebabkan seorang kiai tidak lagi dominan menentukan pengaruhnya di masyarakat, peran kiai tidak lagi multifungsional akan tetapi monofungsional. Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik*, hlm. 2-5

⁶ Tipologi faksional dalam NU merujuk analisa Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 74-90. Bandingkan dengan Laoda Ida, "Kembali ke Khittah 1926: Membangun Gerakan Politik Kultural NU" Prisma, 5 Mei 1995, hlm. 91-93. Menurutnya, ada tiga faksi antara lain; faksi Suriah/Kyai, Cendikia, dan faksi politik. Dalam konteks sekarang terdapat perbedaan terhadap masing-masing faksi tersebut, terutama setelah NU melahirkan PKB dan Abdurrahman Wahid (GusDur) menjadi presiden RI ke-4.

pertanyaan inti: mengapa terjadi fragmentasi politik elite Kiai NU Jawa Timur Pilpres 2014 dan bagaimana para para kiai tersebut memaknai dan memandang konflik yang terjadi diantara mereka.

Diambilnya Jawa Timur sebagai *setting* penelitian, karena di provinsi inilah basis Islam tradisional (NU) berada, dan di provinsi inilah terdapat kiai-kiai kharismatik ditingkat nasional, banyak pesantren-pesantren besar dengan ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi inilah yang dibidik oleh capres-cawapres di pilpres 2014 untuk memperoleh dukungan suara dari warga nahdlyin. Walaupun secara formal pengurus NU Jawa Timur menyatakan netral dalam panggung pilpres 2014, namun realitasnya, banyak elite-elite NU Jawa Timur terlibat secara aktif dalam dinamika pilpres 2014 dengan cara menjadi tim sukses atau sekedar memberi dukungan pada capres-cawapres tertentu.

Signifikansi penelitian ini, *pertama*, untuk memperluas studi tentang kiai terutama fragmentasi politiknya. Diskursus tentang kiai sebagai elite agama dalam politik praktis (*real politics*) masih terjadi polemik tidak hanya dikalangan kiai itu sendiri, akan tetapi meluas dikalangan masyarakat dan akademisi ketika dihadapkan pada wacana Islam dan politik. Fragmentasi politik kiai menjadi kajian yang sangat penting untuk diteliti dalam rangka untuk menguji teori elite ketika dikontekstualisasikan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kedua, wacana fragmentasi dalam tubuh partai politik mungkin sebuah kajian yang biasa saja, akan tetapi wacana fragmentasi politik dalam

CSO (*Civil Society Organization*) seperti NU dan Muhammadiyah yang diperankan oleh para elitnya mungkin belum banyak yang mengkajinya. Teori fragmentasi atau faksionalisasi sangat tepat untuk mengkaji fragmentasi politik yang terjadi diantara para kiai Jawa Timur dalam pilpres 2014 yang lalu untuk mengungkap faktor dan penyebab terjadinya fragmentasi.

Ketiga, ketegangan politik pada pilpres 2014 telah menyebabkan terjadinya dinamika politik dikalangan kiai karena fragmentasi afiliasi dukungan politik pada capres-cawapres tertentu. Ekspresi politik yang berbeda-beda tersebut telah menyebabkan kebingungan terhadap warga nahdliyin tak terkecuali di jami'yyah NU. Akan tetapi uniknya, pada momen yang lain para elite kiai itu bersatu seolah melupakan fragmentasi yang pernah terjadi sebelumnya, maka mengkaji proses rekonsiliasi antar kiai ini sangat penting untuk dikaji dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pemilihan presiden 2014?
2. Mengapa terjadi perbedaan preferensi politik antar kiai Jawa Timur?
3. Bagaimana para kiai Jawa Timur memaknai dan merekonsiliasi konflik akibat perbedaan preferensi politik tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mencari pemahaman tentang mengapa terjadi fragmentasi politik antar kiai NU Jawa Timur dalam Pilpres 2014, hasil jawaban-jawaban dari persoalan tersebut kemudian dianalisis apa sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya fragmentasi.
- b. Untuk mengetahui apa makna fragmentasi politik menurut para kiai, kemudian dianalisis proses rekonsiliasi antar kiai ketika dikontekstualisasikan dalam dinamika politik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kegunaan akademis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Akademis:
 - 1) Studi ini diharapkan memberikan sumbangan keilmuan terutama rumusan teoritik tentang kiai dan politik. Studi tentang kiai menurut teori elite dapat dikategorikan sebagai elite agama dan elite politik senantiasa terus mengalami perubahan tergantung situasi dan momen politik yang berbeda. Hemat penulis studi tentang politik kiai masih sedikit dilakukan terutama yang menyangkut fragmentasi politiknya.

- 2) Memberikan perspektif baru mengenai teori-teori yang disajikan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut akan terus berkembang seiring situasi yang terus berubah dan belajar dari kasus yang baru dan belum pernah dikaji sebelumnya, dan mencari format baru yang sesuai dengan situasi saat ini.
- 3) Memberikan konstiribusi pengetahuan mengenai studi politik Islam di Indonesia, khususnya CSO (*Civil Society Organization*) seperti NU dan Muhammadiyah yang diperankan oleh para elitnya, terutama yang menyangkut fragmentasi politik. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi Indonesia.

b. Praktis:

- 1) Mendapatkan penjelasan mengenai fragmentasi politik elite NU Jawa Timur terutama yang terjadi pada pilpres 2014 yang lalu, fragmentasi politik kiai ini bisa saja terus terjadi di setiap momen demokrasi di Indonesia.
- 2) Mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana para kiai tersebut memaknai fragmentasi politik yang terjadi antar mereka, dan bagaimana proses rekonsiliasi akibat dari fragmentasi politik yang telah melibatkan mereka.
- 3) Hasil studi ini diharapkan sebagai saran atau rekomendasi terutama bagi kiai dan santri yang ikut berpartisipasi dalam politik dan sebagai acuan bagi CSO seperti NU dan

Muhammadiyah agar tetap *survive* dalam kancah politik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang kiai telah banyak dilakukan oleh para ahli sosial dan politik yang menempatkan kiai sebagai faktor penentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian tersebut bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori.⁷ *Pertama*, kajian yang menekankan pada aspek keagamaan kiai, seperti tulisan Ali Haidar,⁸ Martin Van Bruinessen,⁹ dan Abdul Jamil.¹⁰ *Kedua*, menekankan pada aspek kepemimpinan kiai baik pada dunianya sendiri, seperti tulisan Zamakhsari Dhofier,¹¹ Imron Arifin¹², maupun masyarakat luas seperti tulisan Clifford Geertz,¹³ Hiroko Horikoshi,¹⁴ Bisri Effendi,¹⁵ Lik Arifin Mansur Noor,¹⁶ Ibn Qoyim Ismail,¹⁷ Pradjarta Dirdjosanyoto,¹⁸ dan Endang Turmudzi.¹⁹

⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 9-18

⁸ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994)

⁹ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992)

¹⁰ Abdul Jamil, *Perlawanan Kyai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifai Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001)

¹¹ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982)

¹² Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasada Press, 1992)

¹³ Clifford Geertz, *The Javanese Kiai: The Changing Role of Cultural-Broker*, dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol 2. 1960

¹⁴ Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987)

¹⁵ Bisri Effendi, *An-Nuqoyyah: Gerak Transformasi Sosial di Madura* (Jakarta: P3M, 1990)

¹⁶ Lik Arifin Mansur Noor, *Islam in an Indonesian Word: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997)

Ketiga, studi yang memfokuskan aspek kesejarahan kiai. Yang berkaitan dengan studi ini ditulis oleh Azyumardi Azra.²⁰ Ia mengkaji transmisi para kiai nusantara dengan para ulama' Timur Tengah. *Keempat*, tentang Islam dan Negara, dimana di dalamnya melibatkan para Kiai. Beberapa karya yang masuk dalam kategori ini ditulis oleh Deliar Noer,²¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif,²² dan Abdul Munir Mulkhan.²³ *Kelima*, kajian yang memfokuskan tentang biografi seorang Kiai dalam tradisi pesantren disebut *manaqib*. Hampir semua Kiai memiliki riwayat hidup yang dibukukan oleh keluarga dan para santrinya, dalam biorafi tersebut biasanya mengungkap silsilah keturunan, riwayat pendidikan, keterlibatan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, karya tulis, maupun contoh tauladan yang bisa diambil hikmah oleh santri maupun masyarakat.

Untuk memudahkan membaca hasil studi terdahulu yang secara langsung meneliti tentang hubungan kiai dan Politik atau keterlibatan kiai dalam politik praktis (*real politics*), peneliti meringkasnya sebagai berikut:

¹⁷ Ibn Qoyyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa, Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990)

¹⁸ Pradjarta Dirjosanyoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren: Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999)

¹⁹ Endang Turmudzi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2003)

²⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Bandung: Mizan, 1994)

²¹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafiti Press, 1987)

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996)

²³ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Jakarta: Siepress, 1992)

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society	Ali Maschan Moesa (1999)	Ia melihat bagaimana para Kiai memandang hubungan agama dan politik sebagai <i>traditional religio-political system</i> yaitu sistem kemasyarakatan dimana tidak ada pemisahan antara komunitas politik dan komunitas keagamaan. Pandangan inilah yang sering menempatkan para Kiai pada posisi sulit dan dilematis. Kesulitan terjadi karena mereka harus membawa misi yang berbasis spritual ke dalam praksis politik yang bersifat profan. Ia juga menyimpulkan bahwa hubungan agama dan politik yang integralistik itu selalu mengakibatkan dua implikasi yang tidak menguntungkan: <i>Pertama</i> , agama diposisikan sebagai instrumen politik. <i>kedua</i> , persentuhan tersebut selalu menimbulkan radikalisasi politik atas nama agama. Bahkan terjadi pembunuhan terhadap lawan politik atas nama agama.
2	Memelihara Umat: Kiai Pesantren: Kiai Langgar di Jawa	Pradjarta Dirdjosanyoto (1999)	Peran dan efektifitas kepemimpinan Kyai pesantren dan Kyai langgaran di pedesaan tahun 1980-1989. Ia mengkaji peranan Kyai dalam perubahan sosial dan politik di daerah pedesaan kecamatan Tayu, Pati Jawa Tengah. Persoalan pokok yang disoroti oleh Dirdjosanyoto adalah tentang respon para Kiai sebagai pemimpin agama terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di sekeliling mereka. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa para Kiai mampu bertahan dalam situasi yang sangat kompleks, karena seorang Kyai mempunyai peran ganda yaitu sebagai tokoh agama dan tokoh politik.
3	Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan	Endang Turmudzi (2003)	Ia menjelaskan bahwa ada dua lembaga formal yang dijadikan para Kiai untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Dua lembaga ini secara simultan telah menciptakan pola hubungan yang berbeda, dan keduanya merupakan pilar penting yang menopang keKyaian mereka. Dua lembaga tersebut adalah pesantren dan tarekat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1992 hingga september 1993 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Jombang Jawa Timur.
4	Peran Kiai Pesantren	Achmad Patoni	Studi ini menelaah keterlibatan Kiai

	dalam Partai Politik	(2007)	dalam Partai Politik, ada beberapa bentuk: <i>Pertama</i> , sebagai aktor. Dalam konteks ini Kiai menjadi anggota tim sukses sekaligus juru kampanye. <i>Kedua</i> , sebagai pendukung. Dalam konteks Kiai hanya sebagai pendukung tapi tidak berada di garis depan untuk memenangkan calon. <i>Ketiga</i> , sebagai partisipan. Kiai hanya memberikan restu pada calon tertentu.
5	Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai	Imam Suprayogo (2009)	Studi ini dilakukan di Kawasan pedesaan di Kecamatan Tebo. Dalam penelitian ini terungkap bahwa orientasi politik Kiai begitu variatif karena di pengaruhi oleh faktor ontar eksternal dan eksternal. Akan tetapi penelitian ini belum menyentuh ke aktor-aktor individu elite Kiai tersebut dan implikasi politiknya.
6	Politik Kiai dan Politik Rakyat	Muhibbin (2012)	Studi ini fokus kajiannya pada respon masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik dan fragmentasi politik Kyai. Ada dua jawaban: sebagai (kecil) setuju Kiai terlibat aktif dalam politik, dan sebagaian (besar) tidak setuju Kiai terlibat aktif dalam politik.
7	Artikulasi Politik Santri, Dari Kyai Menjadi Bupati	Nurul Azizah (2013)	Penelitian ini dilakukan di dua Kabupaten; Pamekasan dan Sumenep. Fokus penelitian ini pada pergeseran kepemimpinan Kyai dari kepemimpinan tradisional menuju kepemimpinan rasional dalam sistem demokrasi dan dinamika politik lokal.
8	Kyai di Panggung Pemilu, dari Kyai Khos sampai Kyai High Cost	Munawwar Fuad Noeh (2014)	Fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh kiai terhadap tahapan dan proses pilpres 2004, Kyai mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perhelatan ilpres 2004, Kiai tidak hanya penyokong suara akan tetapi juga aktor politik.

Dari beberapa studi tentang kiai di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus meneliti terjadinya fragmentasi politik antar kiai di panggung pemilu khususnya Pilpres 2014. Studi ini akan menggali secara mendalam dengan berupaya untuk menjawab sebuah pertanyaan mengapa terjadi fragmentasi politik antar elite NU Jawa Timur dalam pilpres 2014 yang lalu. Pertanyaan selanjutnya dalam rangka untuk mengidentifikasi pemahaman keagamaan dan politik seorang kiai tentang makna fragmentasi

politik yang menyebabkan konflik diantara mereka, kemudian bagaimana para kiai tersebut merekonsiliasi konflik yang terjadi antar mereka. Hemat penulis, fragmentasi tersebut hanya bersifat sementara pada momen politik tertentu akan tetapi pada momen politik yang lain mereka bersatu dalam bingkai organisasi NU. Studi inilah yang yang membedakan dengan studi-studi yang lain tentang kiai dan politik yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam tentang fragmentasi politik yang terjadi di kalangan elite kiai. Secara umum ketika kita melakukan penelitian terhadap seorang kiai maka bisa melihat bagaimana praktek politik Islam di Indonesia dalam rangka untuk menjawab persoalan kenegaraan dan bagaimana kontribusi kiai NU dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya organisasi terbesar di Indonesia yakni NU bisa berkontribusi positif terhadap demokratisasi di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Diskursus kiai dan politik seolah tidak pernah habis untuk diperbincangkan seiring dengan dinamika politik dan strukrur sosial yang terus berubah yang memunculkan dinamika pemikiran dan konflik internal akibat perbedaan kepentingan ideologis, politik ataupun kepentingan pragmatisme politik. Melalui pendekatan sistem, akan diungkap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fragmentasi baik faktor internal maupun

eksternal, kemudian dipetakan dalam kesatuan sistem untuk menganalisis pemikiran antar elite NU Jawa Timur tersebut.

Sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan menganalisis sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori yaitu teori elite, fragmentasi elite dan teori *al-fiqh al-Ikhtilaf*. Penggunaan teori-teori ini selain akan menjelaskan kiprah kiai dalam dunia politik, akan tetapi juga akan mengungkap faktor-faktor fragmentasi politik dan akan menganalisis pemikiran dan pandangan kiai terhadap makna fragmentasi politik tersebut hingga terciptanya proses rekonsiliasi antar mereka, yang pada akhirnya akan dijadikan rumusan politik dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia

1. Teori Elite

Dalam konteks penelitian ini, pertanyaan yang penting adalah siapa yang disebut elite kiai NU?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama akan dibahas tentang teori elite. Istilah elite merujuk kepada makna yang telah dikonsepsikan oleh Putnam, Mosca dan Pareto, elite merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain.²⁴ Menurut Pareto, elite dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok sebagaimana dikutip oleh Bottomore;²⁵ *Pertama*, elite yang memerintah (*governing elite*), terdiri

²⁴ Robert D. Putnam, “Studi Perbandingan Elit Politik” dalam Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 94

²⁵ TB Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, Terj. (Jakarta: Akbar Tandjung Institute 2006), hlm. 2

dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. *Kedua*, elite yang tidak memerintah (*nongoverning elite*). Dengan demikian, keberadaan dan peranan elite tidak bisa dilepaskan dari sebuah proses politik dan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau organisasi tempat dimana para elite tersebut tinggal.

Menurut Keller, elite merupakan sejumlah orang yang memiliki pengaruh dalam sebuah organisasi, dalam perspektif sosiologis elite lebih ditujukan pada elite politik. Posisi elite di tempatkan dalam wilayah yang politis yang memberikan warna dalam pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi. Elite merupakan kelompok kecil orang dalam sebuah masyarakat organisasi yang memegang posisi dan peranan penting.²⁶ Sementara Haryanto menjelaskan bahwa elite itu senantiasa merujuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu dimana dengan keunggulan tersebut yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu.²⁷

Sementara Mills memandang bahwa elite adalah individu-individu yang menduduki posisi puncak pada institusi-institusi ekonomi, militer dan politik. Elite dalam konteks ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat.²⁸ Individu-

²⁶ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elite dalam Masyarakat Modern*, Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 30.

²⁷ Haryanto, *Elit, Massa dan Konflik* (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, UGM, 1990), hlm. 6

²⁸ C Wright Mills, *The Power Elite* (New York: Oxford, 1956), hlm. 269

individu yang berada pada puncak institusi tersebut pada gilirannya membentuk elite kekuasaan yang keputusan-keputusannya dapat mempengaruhi semua orang berada dibawah institusi yang lebih rendah.

Untuk melihat kelompok elite dalam NU sangat tepat meminjam definisi sebagaimana ditulis oleh J.W. Schoorl yang dikutip oleh Haryanto:

“bahwa yang dimaksudkan dengan elite ialah posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan bebas.”²⁹

Dari pemaparan J.W.Schoorl diatas, dapat disimpulkan bahwa kiai adalah elite agama karena kiai merupakan figur teladan dan rujukan dalam penyelesaian keagamaan. Elite kiai selain bisa menyelesaikan urusan agama, seorang kiai dengan kharismanya bisa memobilisasi massa untuk kepentingan politik.

Elite dalam konteks penelitian ini adalah elite agama, kiai atau orang-orang yang berada dalam kepengurusan NU. Dalam tradisi NU, yang dimaksud dengan elite adalah kiai yang berada dalam kepengurusan di tingkat pusat (PBNNU), wilayah (PWNU) atau cabang (PCNU), baik kedudukannya sebagai Musytasyar, Syuriah dan Tanfidziyyah. Selain itu, termasuk elite NU adalah para kiai yang berada di jalur kultural NU yang mempunyai pesantren dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

²⁹ *Ibid*, hlm. 68

Selain itu, secara kultural elite kiai mempunyai kekuatan kharisma yang melekat pada diri seorang kiai untuk memobilisasi kekuatan massa.³⁰ Peran elite kiai menjadi sangat signifikan sebagai *institutional builder* atau pendorong pengembangan institusi politik dengan aktifitas yang terkonsentrasi pada sistem internal partai. Kekuasaan dan sumber kekuasaan yang melekat pada diri seorang elite kiai akan menjadi baik jika ditransformasikan sebagai kekuatan institusi yang mendorong tegaknya demokrasi Indonesia.³¹

Dengan demikian, posisi kiai sebagai elite agama, tidak menutup kemungkinan disebut sebagai elite kelompok yang lain; seperti elite politik, ekonomi maupun elite sosial. Dalam beberapa kasus politik yang terjadi selama ini, para kiai terlibat dalam kegiatan politik praktis.³² Teori inilah yang menganalisis dinamika politik kiai dan implikasi politik kiai terhadap pilihan politik masyarakat.

2. Teori Fragmentasi Elite

Teori fragmentasi tidak banyak dikenal dalam ilmu politik dan ilmu sosial, istilah fragmentasi lebih populer dengan terminologi faksionalisasi, diferensiasi sosial, pluralitas dan sebagainya. Fragmentasi

³⁰ Menurut Abdur Rozaki, kharisma yang dimiliki seorang Kiai merupakan salahsatu kekuatan yang dapat memobilisasi pengaruh di masyarakat. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan; *Pertama*, kharisma yang diperoleh oleh Kiai secara *given*, seperti tubuh besar, suara yang keras dan mata yang tajam serta adanya ikatan geneologis dengan Kiai kharismatik sebelumnya. *Kedua*, kharisma yang diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang saleh. Lihat selengkapnya: Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 87-88.

³¹ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri, Dari Kyai Menjadi Bupati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 72.

³² Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik*, hlm. 30.

berarti ketidaksatuan, keberagaman dan konflik baik dalam kehidupan nyata, konflik ideologi atau perbedaan afiliasi politik. Fragmentasi merupakan ekspresi dari faksionalisme, meskipun hal ini merupakan istilah yang berbeda, sebab fragmentasi itu spontan dan temporer, sedangkan faksionalisme berlangsung lebih lama.³³ Fragmentasi juga bisa jadi mengarah kepada faksionalisme yang berlaku juga dalam organisasi non-politik sekalipun. Untuk memperjelas definisi tersebut perlu juga melihat konsep faksionalisme yang banyak digunakan dalam kajian politik kepartaian.

Fenomena fragmentasi politik terjadi dikalangan para kiai NU menjelang pilpres 2014, walaupun secara organisatoris NU menyatakan netral di panggung pilpres, namun politik dukung mendukung tetap saja dilakukan oleh para elite atau para kiai baik struktural atau kultural NU. Menurut Lewis, terjadinya fragmentasi atau faksionalisasi dalam sebuah organisasi dapat dipahami sebagai sebuah pola yang bersifat sementara dan temporal, faksi itu terjadi hanya pada isu-isu tertentu hal ini merupakan ciri-ciri organisasi modern.³⁴

Faksionalisasi dalam organisasi pada awalnya disebabkan kontrol pimpinan yang lemah yang berkembang pesat dan terkonsolidasi yang kemudian melemahkan kesatuan dan kekompakan dalam organisasi.

³³ Faksionalisme diartikan sebagai perjuangan golongan atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan sedangkan faksi adalah golongan atau kelompok orang, khususnya di partai politik yang sering berdebat untuk kepentingan mereka; juga disebut fraksi. Lihat: B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.162.

³⁴ Paul G Lewis, *Political Parties in Post-Comunist Eastern Europe* (New York: Routledge, 2000), hlm. 116

Menurut Belloni, penyebab terjadinya faksionalisasi tidak hanya disebabkan oleh kontrol pimpinan yang lemah namun juga disebabkan oleh tiga hal³⁵, antara lain: *Pertama*, faksi yang terbentuk berdasarkan persamaan pandangan terhadap isu-isu politik. Faksi model ini tidak didasarkan pada ikatan yang bersifat formal.

Kedua, faksi yang terbentuk melalui pola patron-klien. Faksi model ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan individu, yaitu persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu organisasi yang mempunyai basis pendukung yang jelas. *Ketiga*, faksi yang formal dan terorganisir. Faksi jenis ini memiliki kejelasan berupa nama resmi dan memiliki kesekretariatan yang jelas beserta program-program yang rutin dan tersendiri. Sedang menurut Andrew J. Nathan bahwa, faksionalisasi terjadi juga disebabkan konflik antar elite di internal organisasi dengan melibatkan kekuatan kader atau massa di tingkat bawah.

Teori faksionalisasi atau fragmentasi elite digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai terjadinya fragmentasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fragmentasi antar elite. Penulis menggunakan teori faksionalisasi elite dengan meminjam istilah faksionalisasi dalam partai politik, walaupun ada perbedaan mendasar antara orientasi partai politik dan non partai politik.³⁶ Dalam organisasi NU fenomena fragmentasi sangat jelas terjadi antar elite NU dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 3

saling dukung-mendukung terhadap salah satu capres-cawapres tertentu dalam pilpres 2014 yang lalu.

Dalam sejarah perjalanan NU, fragmentasi atau konflik yang terjadi antar elite NU biasanya tidak menyangkut nilai dasar dan inti ideologi. Laode Ida menyebut, konflik internal di tubuh NU biasanya terjadi karena perbedaan *furu'iyah*, biasanya yang paling sering terjadi dalam masalah politik atau fragmentasi afiliasi politik, akan tetapi dalam momen tertentu, seperti istighasah, haul, acara pengajian dan lain-lain, mereka bersatu seolah tidak pernah terjadi konflik.³⁷

3. Teori *al-Fiqh al-Ikhtilaf*

Teori atau konsep *al-fiqh al-ikhtilaf* dalam penelitian ini, untuk menganalisis bagaimana para kiai menginterpretasi fragmentasi yang terjadi dikalangan para kiai. Kata *ikhtilaf*³⁸ dan *khilafiyyah* seolah menjadi satuan kata, *ikhtilaf* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan pendapat, sedangkan kata *khilafiyyah* diartikan sebagai perbedaan pendapat dalam masalah hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama'. *Ikhtilaf* atau *khilafiyyah* sama-sama mempunyai makna perbedaan pendapat baik dalam hal sosial, politik dan hukum, sepanjang perbedaan pendapat itu bersifat *furu'iyah* (sosial, ekonomi, politik dan

³⁷ Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996). Fokus kajian dalam buku ini adalah anatomi konflik elite Islam dan negara, kajiannya memfokuskan pada konflik internal dan eksternal yang menyertai perjalan NU.

³⁸ Istilah *Ikhtilaf* dalam tinjauan bahasa Arab berasal dari kata *khalafa* – *yakhlifu* - *khilafan* (خلف-يخلف-خلافا) yaitu perbedaan pendapat (pemahaman), maknanya lebih umum dari kata *al-dhiddu* (الضد) artinya saling berlawanan.

budaya) dan tidak menyangkut masalah *ushuliyyah* artinya hal-hal yang pokok di dalam Islam.³⁹

Dalam fiqh, sumber-sumber hukum Islam (*mashodir al-ahkam*) ada tiga, antara lain: melalui al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad melalui Ijma' dan Qiyas. Konsep ijtihad inilah yang berpotensi terjadinya *ikhtilaf* dikalangan para ulama' karena perbedaan dalam menginterpretasi sebuah *nash* ketika dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata, selain faktor tersebut *ikhtilaf* dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan sosial dan politik yang mempengaruhi ulama' tersebut. Maka dibuatlah acuan ijtihad berupa *maqosid asy-syari'ah* (tujuan universal Islam) dan prinsip-prinsip umum (*mabadi' kulliyah*).⁴⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, *al-fiqh al-ikhtilaf* merupakan salahsatu dari lima fiqh antara lain: 1). *Fiqhul maqoshid* (membahas tentang maksud syariat dalam segala aspek kehidupan. 2). *Fiqhul auliyat* (skala prioritas), 3). *Fiqhus sunnah* (sunnah kauniyah dan ijtimaiyyah), 4). *Fiqhul muwazanah bainal masholih wal mafasid* (pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudhratan, 5). *Fiqhul ikhtilaf* (perbedaan pendapat).⁴¹

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *ikhtilaf* adalah perkara yang *kauni* (*sunnatullah*), sedangkan mencegahnya adalah wajib.

³⁹ M. Yusuf Amien Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf NU dan Muhammadiyyah* (Wonosobo: TP, 2012), hlm. 8-9.

⁴⁰ Syeikh Muhammad, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh; Hasil Refleksi Ijtihad*, Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 64.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Ikhtilaf* (Jakarta: Robbani Press, 2015)

Ikhtilaf bukan berarti *iftiraaq* (perpecahan), karena sesungguhnya *iftiraaq* menyimpang dari ajaran agama. *Ikhtilaf* hukumnya boleh selama bersumber dari ijtihad, dengan artian walaupun ijtihadnya salah maka tetap akan mendapatkan pahala. Dalam hal ini, perlu kesadaran untuk mengedepankan sikap toleransi terhadap pendapat yang berbeda, dan menyadari bahwa persoalan yang diperselisihkan itu bukanlah persoalan yang syar'i.⁴²

Adapun hikmah *ikhtilaf* para ulama' mengacu pada hadits Nabi "*Ikhtilafu Ummatii Rohmatun*"⁴³ perbedaan diantara ummatku adalah rahmat. Kata "ummatku" dalam hadits ini adalah para ulama' yang berijtihad dalam masalah *furu'iyah*. Perbedaan pendapat terutama dalam persoalan fiqh atau *furu'iyah* merupakan khazanah dalam dunia Islam dan memberikan kontribusi penting dalam pemikiran keagamaan terutama pada masa awal Islam.

Dalam Islam ada beragam *ikhtilaf*, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, *ikhtilaf* yang tidak dibenarkan. *Kedua*, *ikhtilaf* yang bisa dibenarkan. *Ikhtilaf* yang tidak bisa dibenarkan dalam hal *ushuliyyah* yaitu prinsip-prinsip pokok berupa aqidah dan tauhid. Adapun *Ikhtilaf* yang bisa dibenarkan adalah *ikhtilaf* dalam hal

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hadits ini adalah hadits muallaq yang di riwayatkan oleh Imam Malik, tidak ada ulama' yang mengatakan *maudhu'* cuma mereka kesulitan mencari sanadnya, para ulama menisbatkan hadits ini muallaq kepada Imam Malik. Hadits muallaq dihukumi *dhoif*, menggunakan hadits *dhoif* menurut kalangan ulama boleh selama tidak berkaitan dengan hukum.

furu'iyyah, menyangkut praktek *'ubudiyyah*, praktek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Dalam konteks penelitian ini, *ikhtilaf* dalam hal politik yang terjadi diantara para kiai NU tidak menyangkut persoalan *ushuliyyah* dalam Islam atau persoalan ideologi negara atau Pancasila sebagai dasar negara, akan tetapi *ikhtilaf* tersebut hanya dalam masalah *furu'iyyah* artinya keterlibatan kiai dalam politik praktis atau perbedaan afiliasi politik dalam saling dukung-mendukung pada capres-cawapres tertentu dalam pilpres 2014. Idealnya *ikhtilaf* tidak boleh mengarah pada konflik tetapi harus menjadi daya dinamis dan kreatif bagi lahirnya sebuah rekonsiliasi menuju transisi demokrasi Indonesia.

4. Resolusi Konflik

Dalam kehidupan sosial dikenal dua hubungan harmoni dan disharmoni, istilah yang terakhir dikenal dengan istilah konflik. Konflik bisa bersifat laten (tersembunyi) dan manifest (nampak), bila sudah mengejawantah kerap kali menimbulkan korban. Konflik dalam perspektif sosiologis terutama yang dipelopori Lewis Coser menegaskan bahwa ketegangan sosial yang berujung pada konflik dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu konflik yang bersifat fungsional (baik) dan konflik yang bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan

struktur-struktur sosial.⁴⁴ Dalam konteks dunia kiai, konflik itu terjadi karena perbedaan pradigma dalam melihat sebuah persoalan.

Sementara resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Ada tiga pendekatan resolusi konflik menurut Hugh Maiall dalam bukunya *Contemporary Conflict Resolution*: pencegahan konflik untuk memelihara perdamaian (*peace keeping*), mendorong transisi dan transformasi konflik dengan upaya membentuk perdamaian (*peace making*) dan mendorong rekonsiliasi dengan membangun perdamaian (*peace building*).

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif berdasarkan studi kasus (*case study*) fragmentasi politik elite kiai NU Jawa Timur dalam pilpres 2014. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu dengan bentuk kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan.⁴⁵

Sedangkan deskriptif merupakan prosedur atau cara memecahkan masalah

⁴⁴ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 157.

⁴⁵ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 25

penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta.⁴⁶

Penelitian kualitatif-deskriptif dilakukan dengan mengakumulasi data-data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena fragmentasi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fragmentasi antar kiai NU Jawa Timur dalam pilpres 2014 yang lalu. Pada tahapan analisis, peneliti dapat menerangkan fenomena fragmentasi kiai dan mengungkap faktor-faktor dengan kasus yang baru dan belum pernah diketahui oleh masyarakat.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah para kiai NU di Jawa Timur baik struktural maupun kultural. Struktural berarti para kiai yang menduduki jabatan di PWNU Jawa Timur (Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah). Sedangkan kultural berarti para kiai yang secara formal tidak menduduki jabatan di PWNU Jawa Timur akan tetapi secara kultural bersentuhan langsung dengan warga NU, biasanya para kiai ini menjadi pengasuh pesantren yang jumlahnya lebih banyak dan menyebar di seluruh Jawa Timur.

Para kiai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kiai yang secara terang-terangan mendukung salahsatu capres-cawapres dalam pilpres 2014 yang lalu. Dengan demikian, unit analisis dalam penelitian ini

⁴⁶ Hadari Nawawi dan Matini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 7.

adalah fragmentasi afiliasi politik para elite kiai NU Jawa Timur dalam pilpres 2014. Adapun untuk mengetahui peran politik kiai Jawa Timur pada pilpres 2014 maka informan kunci (key informant) yaitu KH. Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua PWNU Jawa Timur), dan untuk mengetahui pemikiran perbedaan preferensi politik terhadap capres-cawapres pada pilpres 2014, maka dipilihlah beberapa kiai sebagai berikut: 1). Mewakili kubu Prabowo-hatta yaitu: KH. Anwar Manshur dan KH. Anwar Iskandar. 2). Mewakili kubu Jokowi-JK yaitu Gus Shobi (putra KH. Aziz Manshur). Untuk memperkaya analisis penelitian, penulis juga mewawancarai pengurus LTNU Jawa Timur, Santri dan alumni.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan atau data sekunder yang meliputi dokumen dan lain-lain.⁴⁷ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran dan pandangan-pandangan yang pernah disampaikan oleh individu-individu kiai di media massa, hasil wawancara atau kesaksian baik secara lisan atau tulisan. Sedangkan data sekunder berasal dari data historis yang faktual berupa laporan di media massa, dokumen, buku dan referensi pustaka yang lain yang dapat digunakan untuk memahami, membandingkan serta mempertajam analisis.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 157.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun teknik pengumpulan data yang paling memungkinkan untuk melakukan sistimatisasi dalam melakukan analisis terhadap studi kasus (*case study*) yang sudah terjadi, menurut Robert K. Yin meliputi; Dokumen-dokumen, Arsip dokumen, wawancara, pengamatan langsung, partisipan-observasi.⁴⁸ Kemudian untuk mempermudah melakukan analisis, penulis mengelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema kajian yang hendak diteliti baik berupa buku, opini atau informasi media massa baik cetak atau *online*, atau dokumen-dokumen resmi. Dengan demikian semua referensi tersebut dalam rangka untuk memperkaya kajian sebagai bahan analisis data dan kajian teoritis yang lebih mendalam.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara adalah sumber informasi yang paling penting untuk menggali informasi tentang tema penelitian atau verifikasi data yang dipublikasikan di media massa atau dari informan yang berbeda perspektif. Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar

⁴⁸ Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 103

yang akan ditanyakan,⁴⁹ atau melalui teknik wawancara secara informal dan terbuka (*opened interview*).⁵⁰ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengungkap pandangan dan pendapat atau klarifikasi dari sebuah hipotesis awal, atau dengan kata lain wawancara ini sebagai diskusi antara penulis dan informan untuk mengetahui jawaban dari masalah inti penelitian secara mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman terdiri dari: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*).⁵¹ Adapun tahapan-tahapan analisis data yang akan dilakukan penulis setelah mengumpulkan data-data baik dari dokumen, referensi buku, wawancara, maupun foto-foto, dikelompokkan berdasarkan bentuk, kategori dan uraian dasar yang mudah dipahami, maka tahap *pertama*, mereduksi data (*data reduction*), berarti penulis merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran tentang tema pokok dalam penelitian ini yaitu wacana politik kiai atau fragmentasi politik kiai.

Kedua, penyajian data (*data display*) dalam bentuk deskriptif dan naratif dengan berusaha menginterpretasi data dengan teoritisasi yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini, sebuah analisis akan

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 229.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 13.

⁵¹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 218.

menjelaskan dan menggambarkan faktor fragmentasi politik yang terjadi di kalangan kiai Jawa Timur. *Ketiga*, pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*) pada tahap ini penulis melakukan kesimpulan dari hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan diawal penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang meliputi satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab kesimpulan, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Penulis mendeskripsikannya secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dari sebuah penulisan penelitian, maka logika dan sistematika sudah dirancang sedemikian rupa.

Bab kedua membahas tentang wacana kiai dan politik dalam konteks dinamika politik Indonesia. Beragama interpretasi terhadap rumusan Khittoh NU 1926 telah menimbulkan dinamika politik kiai terutama keterlibatannya dalam politik praktis khususnya dipangung pilpres yang dipilih secara langsung di Indonesia. Teori elite digunakan untuk menganalisis peran politik kiai terutama keterlibatannya pada pilpres 2014, teori inilah yang akan mengungkap dinamika politik kiai dan partisipasi politik kiai.

Bab ketiga membahas tentang dinamika preferensi politik kiai Jawa Timur pada Pilpres 2014. Pada sub bab akan dipaparkan tentang sosial-politik Jawa Timur dan konfigurasi politik kiai menjelang pilpres 2014. Sedangkan pada sub bab berikutnya ingin menjawab sebuah rumusan masalah yaitu apa bentuk perbedaan preferensi politik pada pilpres 2014.

Bab keempat menganalisis secara mendalam mengenai perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pilpres 2014. Spektrum perbedaan preferensi politik dan polarisasi kiai menjadi awal pembahasan pada bab ini. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan preferensi politik kiai yaitu untuk menjawab rumusan masalah mengapa terjadi perbedaan preferensi politik antar kiai. Selanjutnya akan dibahas makna perbedaan preferensi politik dan rekonsiliasi antar kiai pasca pilpres 2014.

Bab kelima kesimpulan, mengakhiri keseluruhan dari penelitian ini, bab ini akan memberikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah, dan diharapkan ada temuan keilmuan yang baru mengenai tema kiai dan politik dengan kasus yang baru, pada akhirnya akan melakukan kritik terhadap teori atau justru melahirkan teori baru. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran, bagaimana seharusnya ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah berperan dan memberikan kontribusi positif dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pilpres 2014 terdapat tiga kubu kiai: *pertama*, kubu Prabowo-Hatta yaitu para kiai preferensi politik kiai ke pasangan capres Prabowo-Hatta. *Kedua*, kubu Jokowi-JK yaitu para kiai preferensi politiknya ke pasangan capres Jokowi-JK. *Ketiga*, independen atau netral yaitu para kiai yang menyatakan dirinya netral dalam pilpres 2014.

Adapun keterlibatan kiai di panggung pilpres 2014: *pertama*, sebagai aktor yaitu kiai berperan sebagai tim sukses atau juru kampanye. *Kedua*, sebagai pendukung yaitu kiai mendukung terhadap capres tertentu, akan tetapi tidak menjadi garda depan untuk memenangkannya. *Ketiga*, sebagai partisipan yaitu kiai yang hanya memberikan restu pada semua capres tapi tidak terlibat dalam saling dukung-mendukung. Keterlibatan kiai tersebut dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang menjadi instrumen utama mengajak masyarakat untuk memilih capres pada pilpres 2014. Aktivitas keagamaan yang dimaksud dapat berupa pengajian rutin, istighasah dan acara keagamaan yang lain.

2. Perbedaan preferensi politik kiai pada pilpres 2014 dipengaruhi oleh adanya spektrum mainstream kiai, utamanya dalam aras politik ke-NU-an, yang antara lain: *pertama*, multi interpretasi terhadap rumusan khittah NU 1926 yang berdampak pada ekspresi politik yang berbeda-beda yang diperankan oleh para elite di NU. *Kedua*, merosotnya kharisma para kiai khususnya yang ada dipuncak kepemimpinan NU. *Ketiga*, pluralitas kepentingan diantara elite-elite NU sehingga melahirkan bentuk pragmatisme politik.

Spektrum perbedaan antar kiai tersebut kemudian melahirkan tipologi kiai dalam merespon fenomena pilpres 2014, antara lain: *Pertama*, fundamentalis politik atau disebut juga pragmatisme politik. Kelompok ini berjuang mati-matian untuk meyakinkan massa nahdliyin untuk memilih capres-cawapres yang diusungnya. *Kedua*, moderat Politik, Kelompok ini aktif mencari informasi dan menganalisis untuk menentukan arah politik. Kelompok ini lebih menekankan pada gerakan kultural NU ketimbang partai politik dalam rangka untuk memenangkan capres yang didukungnya. *Ketiga*, khittah Produktif, kelompok ini selalu menggunakan Khittah 1926 sebagai tolak ukur perjuangan dalam ranah politik. Dalam praktis tindakan politis, mereka cenderung menjaga jarak dan tidak mau terjebak dalam “lumpur” politik dan partai politik yang dianggapnya penuh dengan intrik dan cenderung menimbulkan konflik. Kelompok ini menganggap bahwa NU harus merangkul semua capres-capres yang maju dalam pilpres 2014.

3. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan preferensi politik kiai dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 1). Faktor internal yaitu kontinuitas konflik politik di internal NU dan faktor organisasi NU yang inklusif. 2). Faktor eksternal yaitu faktor terjadinya transisi dan liberalisasi politik di Indonesia dan faktor pragmatisme politik kiai.
4. Perbedaan preferensi politik antar kiai adalah rohmat dan dihalalkan oleh Islam. Pilihan politik merupakan ijtihad dan setiap orang berhak memilih siapa saja. Perbedaan politik dikalangan para kiai biasanya cuma sesaat dan temporal dan tidak merambah ke bentuk konflik apalagi perpecahan.
5. Sedangkan rekonsiliasi yang dilakukan oleh para kiai berpijak pada tradisi pesantren yaitu berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan mengedepankan akhlakul karimah. Prakteknya, rekonsiliasi ala kiai NU itu bersifat kekeluargaan dan sosial, kekeluargaan berarti diselesaikan dengan cara silaturahmi antar para kiai dengan suasana yang tidak formal. Sedangkan sosial adalah model rekonsiliasi melalui acara-acara keagamaan, seperti istighasah, haul, acara pengajian dan lain-lain.

B. Saran-saran

Dari hasil studi tentang fragmentasi politik kiai di atas, maka saran-saran dalam perkembangan demokrasi Indonesia, antara lain:

1. Bahwa perbedaan politik merupakan hal yang biasa dan tidak harus disikapi dengan konflik. Pilpres adalah momen demokrasi lima tahunan, sedangkan rekonsiliasi pasca pilpres adalah hal yang utama demi keutuhan NKRI dan martabat sebagai bangsa.
2. Peran *Civil Society Organization* (CSO) seperti NU dan Muhammadiyah seharusnya elite politiknya menampilkan politik *high politics* artinya politik tingkat tinggi dengan mengedepankan moralitas, tidak hanya perebutan kekuasaan, akan tetapi untuk mpembangunan umat dan bangsa yang lebih baik menuju konsolidasi demokrasi Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadis/Fiqh

- Al-Nadawy, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Az-Zarqa, Ahmad bin Syaikh Muhammad, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet. 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Muhammad, Syeikh, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Terj., Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhul Ikhtilaf*, Jakarta: Robbani Press, 2015.

B. Buku-buku

- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Bisma Satu Printing, 1999.
- Andrews, Mohtar Mas'oed dan Colin Mac, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Anwar, Ali, *Avonturisme NU Menjejaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdliyin*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2004.
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasada Press, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asmawi, *Jendela Politik Gusdur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Asmuni, Jamal Ma'mur, *Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar Nahdlatul Wathan dan Nahdlatut Tujjar*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Azizah, Nurul, *Artikulasi Politik Santri, Dari Kyai Menjadi Bupati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bottomore, TB., *Elite dan Masyarakat*, Terj., Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006.

- Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- _____, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992.
- Choiri, Effendi, *PKB, Politik Jalan Tengah NU, Eksperimintasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Khittah NU 1926*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dirjosanyoto, Pradjarta, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren: Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2009.
- Effendi, Bisri, *An-Nuqoyyah: Gerak Transformasi Sosial di Madura*, Jakarta: P3M, 1990.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Feillard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Geertz, Clifford, *The Javanese Kiyai: The Changing Role of Cultural-Broker, dalam Comparative Studies in Society and History*, vol 2. tt. tp. 1960.
- Hadri, Hadari Nawawi dan Matini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Harker, Richard, *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierro Bourdieu, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktek*, Terj., Yogyakarta: Jalasutra, 1990.
- Haryanto, *Elit, Massa dan Konflik*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, 1990.
- Hayat, Sholeh, *Kyai dan Santri Dalam Perang Kemerdekaan*, Surabaya: PW LTNU Jawa Timur, 2016.
- Horikhosi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.
- Ida, Laode, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

- _____, *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Ismail, Ibn Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa, Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990.
- Ismanto, dkk., *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, Jakarta: Galang Press, 2004.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elite dalam Masyarakat Modern*, Terj., Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Komariah, Djama'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Lewis, Paul G, *Political Parties in Post-Comunist Eastern Europe*, New York: Routledge, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- _____, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Yogyakarta: IAIN Suka Press, 1988.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mills, C Wright, *The Power Elite*, New York: Oxford, 1956.
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhibbin, *Politik Kiai vs Politik Rakyat, Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhtadi, Asep Seaful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama', Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Jakarta: Siepress, 1992.
- Noeh, Munawwar Fuad, *Kyai di Panggung Pemilu, dari Kyai Khos sampai Kyai High Cost*, Jakarta: Renebook, 2014.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Noor, Lik Arifin Mansur, *Islam in an Indonesian Word: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Nugroho, M. Yusuf Amien, *Fiqh al-Ikhtilaf NU dan Muhammadiyyah*, Wonosobo: TP, 2012.

- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah wa Al-Jama'ah Yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: LTNU Jatim, 2006.
- _____, *Peranan Ulama Dalam Kemerdekaan*, Surabaya: PWNU Jatim, 1995.
- Rofiq, MH., *NU dan Ambisi Kekuasaan*, Surabaya: LPK PWGP Ansor Jatim, 2004.
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004
- Soon, Kang Young, *Antara Tradisi dan Konflik Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suprayogo, Imam, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Turmudzi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Wahid, Salahuddin, *Menggagas Peran Politik NU*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Yin, Robert K, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yusuf, Slamet Efendi, *Dinamika Kaum Santri*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Zen, Khoirul Fathoni dan Muhammad, *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan*, Jakarta: P3M, 1986.

C. Jurnal

- Agustino, Leo, "Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014" Prisma, Volume 33, No. 1 tahun 2014.
- Jati, Wasisto Raharjo, "Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama" Ulul Albab Jurnal Studi Islam, Volume 13, No. 1 tahun 2012.

D. Website/Internet

<http://www.nu.or.id>.
<http://islamlib.com>
<http://nasional.kompas.com/read>
<http://pemilu.metrotvnews.com>
<http://www.suaramerdeka.com>
<http://www.tribunnews.com>
<https://m.tempo.co>
<http://jatimprov.go.id>.
<https://jatim.kemenag.go.id>
<http://pendis.kemenag.go.id>
<https://id.wikipedia.org>
<http://www.kpu.go.id>.
<http://kpujatim.go.id>.

E. Wawancara

Wawancara dengan KH. Hasan Mutawwakil Alallah.
Wawancara dengan KH. Anwar Manshur.
Wawancara dengan KH. Anwar Iskandar.
Wawancara dengan Gus Shobi (putra KH. Aziz Manshur).
Wawancara dengan Ifdhalul Maghfur (pengurus LTNU Jawa Timur).
Wawancara dengan Hasyim Fikri (alumni PP. Lirboyo Kediri)
Wawancara dengan Ubaidillah (santri PP. Tarbiyatun Nasyi'in Jombang).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M i s k i, S.H.I.
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 9 Agustus 1985
Alamat : JL. KH. Ali Maksum Krapyak Kulon RT 5
Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Nama Ayah : M. Anwar
Nama Ibu : Siti Barokah
Nama Istri : Hairiyah, S.Pd.I., M.S.I.
Nama Anak : 1. Muhammad Dava Feizkamali
2. Raisa Silmi Najihan
Email : miskianwar@yahoo.co.id
No. HP : 085292197146

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Hidayat Thalibin Sumenep, 1995
- b. MTs. Hidayatut Thalibin Sumenep, 1998
- c. MA Hidayatut Thalibin Sumenep, 2001
- d. S1 Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta, 2005
- e. S2 Prodi Hukum Islam UIN Suka Yogyakarta, 2017

2. Pendidikan Non-Formal

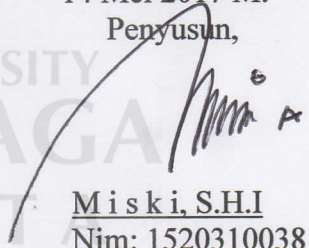
- a. Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin Sumenep, 2001
- b. Al-Ma'had Al-'Aly PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 2008

bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah saya sia-siakan.

10. Teman-teman di Lembaga Survei Indonesia (LSI), terimakasih atas semuanya, baik dukungan moril maupun materil, kalian semua adalah pejuang data demi perkembangan kualitas demokrasi Indonesia.
11. Teman-teman SPPI 2015. saya ucapkan terimakasih atas dukungan, motivasi sehingga Tesis ini bisa terselesaikan. Semoga kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya.

Diharapkan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang sakral saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1438 H
14 Mei 2017 M.
Penyusun,


Miski, S.H.I
Nim: 1520310038

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Bersama KH. Anwar Manshur
PP. Lirboyo Kediri



Bersama KH. Hasan Mutawakkil Alallah
Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya



Bersama KH. Anwar Iskandar
PP. Al-Amin Ngasinan Kediri



Bersama Gus Shobi (Putra KH. Aziz Manshur)
PP. Tarbiyatun Nasyi'in Jombang